BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1.1 Teori Konflik

Seperti apa yang diutarakan oleh Lewis A.Coser konflik adalah perselisihan atau pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang tidak mencukupi persediaannya. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh apa yang diinginkan tapi sekaligus memojokkan dan merugikan lawan mereka. Didalam hampir setiap proses politik selalu berlangsung konflik antara pihak-pihak yang berupaya mendapatkan da<mark>n/at</mark>au mempertahankan sumber yang dipandang penting dan pihak-pihak lain yang juga berikhtiar mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber tersebut. Dalam proses politik berbagai kelompok dan individu menggunakan sarana kekuasaan dimiliki dengan yang berupaya memperjuangkan aspirasidan kepentingannya. Ilmu-ilmu sosial mengenal dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat.Kedua pendekatan struktural-fungsional pendekatan inimeliputi (konsensus) dan pendekatan struktural-konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, serta masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaankeseimbangan dan harmonis.

Sedangkan pendekatan konflik berasumsi masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, dan masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasikan atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Istilah konflik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan. Konflik politik disebabkan dua hal, yaitu:

1.1.1 Konflik Politik Kemajemukan Horizontal

Konflik politik kemajemukan horizontal Adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara cultural, seperti suku bangsa, daerah, agama dan adat istiadat. Kemajemukan horizontal ini dapat menimbulkan konflik, karena masing-masing unsur kultur mempunyai pandangan, budaya yang berbeda-beda, masing-masing kultur tersebut berupaya untuk mempertahankan identitas dan kerakteristik budaya mereka dari ancaman budaya lain, hal inilah yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

1.1.2 Konflik Politik Kemajemukan Vertikal

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1992), 149.

Konflik politik kemajemukan vertikal Adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal ini dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki tau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut.² Untuk memahami konflik, Dahrendorf mengemukakan pandangannya tentang konflik yang selalu melekat dalam realitas sosial:

- a. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam keadaan proses perubahan yang tidak pernah berakhir.
- b. Setiap masyarakat selalu memperlihatkan konflik pada setiap kehidupan sosial.
- c. Setiap unsu<mark>r dalam masy</mark>arakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya.
- d. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.³

Di sini, Dahrendorf mencoba untuk menggambarkan suatu rentang kehidupan sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Konflik ini akan menyertai kehidupan manusia dalam setiap perilakunya. Dengan asumsi manusia yang terlibat konflik dalam waktu yang tertentu, setelah mampu menyelesaikannya akan muncul kembali konflik yang berbeda dari keadaan semula. Dan pendekatan konflik dapat digunakan jika kondisi yang

_

² Ibid, 152-153

³ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 196-198.

mendukung terjadinya suatu konflik relatif sama dengan kondisi yang terdahulu. Bentuk pengaturan konflik yang efektif menurut Ralf Dahrendorf sangan bergantung pada tiga faktor:

- a. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain).
- b. Kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai-berai, dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
- c. Kedua pihak menyepakati aturan main (rule of the game) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.

Paul Conn membagi situasi konflik menjadi dua yaitu konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik menang-menang (non zero-sum conflict) dalam kondisi negara apabila telah memihak pada suatu kelompok, maka konflik yang terjadi adalah konflik yang berujung pada zero sum conflict. Di lain sisi, Simmel mengungkapkan bahwa konflik dapat dilihat sebagai bentuk interaksi social yang sangat mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan solidaritas dan keseragaman. Studi tentang konflik, dalam kaitannya dengan masyarakat itu dikaji oleh pendekatan utama yang popular yaitu pendekatan struktural fungsional dan pendekatan struktural

⁴Soerjono Soekanto dan Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, (Jakarta: Sinat Grafika, 1988), 70.

konflik. Dimana dua pendekatan tersebut menghasilkan model konstruksi analisis yang berbeda. Dalam buku memahami ilmu politik dijelaskan mengenai dua pendekatan ini secara panjang lebar.Dalam pendekatan struktural konflik dijelaskan bahwa konflik adalah gejala yang serba hadir dalam masyarakat, sehingga konflik berarti ada usaha menghilangkan masyarakat itu sendiri. Pendekatan struktural fungsional lebih melihat pada apa yang diperebutkan dan bagaimana tujuan akhir dari konflik tersebut. Dalam memahami ilmu politik juga dijelaskan bahwa pendekatan ini melihat bahwa konflik itu terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, namun konflik itu sendiri akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus).

Model pendekatan pengelolaan konflik bagitu beragam bergantung pada jenis lingkup, bobot, dan factor-faktor penyebab konflik itu sendiri. Ada yang menerapkan pendekatan negosiasi, dinamika kelompok, pendekatan formal dan informal, pendekatan gender, pendekatan kompromi, pendekatan mediasi, dsb.Dalam prakteknya ternyata tidak semudah ucapan.Apalagi kalau konflik itu diciptakan dengan maksud tidak untuk membangun kondisi kehidupan yang sehat. Melainkan untuk kepentingan perusahaan pribadi agar tidak menderita kerugian yang lebih besar dari masyarakat. Kepentingan-kepentingan perusahaan ditempatkan di atas kepentingan masyarakat banyak. Ketika itu terjadi maka ketegangan-ketegangan akan timbul mulai dari ketidaksepakatan, ancaman dan ultimatum, seragam fisik, dan bahkan gerakan-gerakan kekerasan

yang lain. Di sisi lain, konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan-pertentangan ini bisa berbentuk non-fisik yang dapat berkembang menuju benturan-benturan fisik. Jika dilihat dari kadarnya, bisa dibagi menjadi dua yaitu berkadar rendah dimana tidak muncul kekerasan dalam konflik tersebut, bisa juga berkadar tinggi yang kemudian memunculkan tindak kekerasan. Sedangkan term konflik yang menyentuh langsung pada peran negara adalah term konflik politik yang diartikan dengan isu-isu dan kebijakankebijakan umum, selain itu konflik juga dipahami berhubungan langsung dengan proses politik dan pemerinthanan yang sering membawa pada tindak kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat atau negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar negara dan tujuan negara juga mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

1.2 Konsep Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik.⁵ Bagaimanapun juga kelompok pastinya akan selalu berhimpit dengan apa yang disebut sebagai kepentingan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tak ada kelompok tanpa kepentingan, walaupun perlu diingat pula bahwa bila kepentingan tersebut jumlahnya tidak terbatas

⁵ Mochtar Mas'oed (ed) dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarka:, 1978),

sepertinya sangat mustahil sebuah kelompok mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan tersebut. Sekalipun pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan. Masyarakat dan hubungannya dengan kelompok juga dapat dikaitkan dengan ekspresi budaya yang kemudian terwujudkan dalam masyarakat sipil madanilah atau yang sering disebut dengan konsep *civil society*, yang dalam konteks Indonesia sesungguhnya sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban (di desa-desa) yang dominan di masa lalu, ketika kelompok masyarakat berkedudukan sama dan mengatur kehidupan bersama secara bermusyawarah.

Menurut Arthur F. Bentley didefinisikan sebagai suatu porsi manusia tertentu dalam suatu masyarakat, yang diambil bukan sebagai suatu massa tindakan yang tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam aktivitas kelompok-kelompok lain. Karenanya kelompok lebih mewakili proses daripada sesuatu yang statis. Dalam dinamika kelompok, apalagi yang berkaitan dengan politik maka akan selalu terkait dengan apa yang disebut sebagai kepentingan, baik itu menyangkut hal-hal individu maupun yang dilandasi semangat kebersamaan kelompok sebagai entitas bersama yang memiliki tujuan-tujuan kelompok yang sepakat untuk diperjuangkan dan direalisasikan. Kepentingan, menurut Bentley adalah perilaku yang dihadapi menyangkut suatu tuntutan atau tuntutan-tuntuan yang dibuat oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok tertentu dalam suatu sistem sosial. Dalam hal ini,

_

⁶ Varma S.P, *Teori Politik Modern*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,1987), 226

⁷ Miftah Thoha, *Birokrasi dan POlitik di Indonesia*, (Jakarta:, 2003), 55

⁸ Varma S.P, Teori Politik Modern, 227

dipandang kepentinganlah yang mengorganisasikan kelompok-kelompok tersebut. Kita tahu, dalam kemompok biasanya terjadi persaingan eksternal dan internal. Persaingan yang tentunya tidak hanya terkait dengan benturan individu-kelompok tetapi juga mrnyangkut tentang budaya organisasi serta kedudukannya dalam sebuah sistem sosial di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, juga ada benturan antara kenyataan bahwa LSM maupun kelompok-kelompok kepentingan lokal sebagai bentuk kekuatan polik lokal dan realitas bahwa mereka juga termasuk dari modernisasi dan dinamika sistem politik di Indonesia. Karena dalam memahami kelompok, kita perlu memandangnya sebagai sebuah subsistem yang tertanam dalam suatu sistem yang lebih besar. 9 Dalam kenyataannya penelitian empiris apapun memerlukan studi tentang prilaku individu disamping kecenderungankecenderungan aktifitas kelompok. Jika suatu kelompok tidak dapat diteliti dalam pengertian keberadaan manusai selaku individu, bagaimana mungkin dapat diketahui batas-batas ataupun bentuk organisasinya, demikian pula terkait dengan taktik-taktik eksternalnya. Karenanya validitas pendekatan kelompok dapat digambarkan dengan sejumlah contoh dari kehidupan nyata.

Para politisi misalnya, yang ibaratnya merupakan otak dibalik lika-liku kekuasaan seringkali terjebak dalam kesibukan mereka dalam memenuhi ambisi pribadi berkenaan tentang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai fasilitator untuk memenuhi janji-janji politiknya kepada rakyat, melainkan hanya sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti pendapat R.R Gildorf tentang aktivis Partai Kristen Demokrat, dimana ia memandang bahwa semakin besar curahan waktu para aktivis dalam kegiatan-kegiatan partai lebih daripada

⁹ Stephen Robbins P. , Perilaku Organisasi, (Jakarta:, 2003), 60

waktu yang mereka curahkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, semakin besar pula kemungkinan partai itu menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi para aktivis itu sendiri yang bertentangan dengan kepentingan kolektif.¹⁰

Secara sistem kelembagaan baik, para politisi maupun aktivis seringkali tidak bias memisahkan antara kepentingan individu, kolektif (partai) dan tugas-tugas kenegaraan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Wajar saja jika pada tingkatan tertentu, politik seringkali hanya dijadikan sarana atas hal-hal lain yang sebenarnya melatar belakangi mengapa seorang politisi mau bergerak di ranah birokrasi yang sebenarnya lebih bersifat melayani daripada menguasai. Di dalam organisasi atau kelompok sendiri perlu adanya pembelajaran tentang bagaimana membuat organisasi atau kelompok tersebut lebih solid. Dalam bukunya tentang prilaku organisasi Fred Luthans mengemukakan apa yang disebut sebagai organization behavior. Dimana dalam tingkatan kebersamaan perlu adanya komunikasi yang terbuka, adanya idealisasi atau tujuan bersama serta memanfaatkan sumber daya manusia yang optimal.¹¹ Kemudian berdiri dan meningkatnya ormasormas baru, bila tidak ditunjang dengan pengembangan organisatorial yang memadai tidak akan mempengaruhi hegemonisme kekuasaan (dalam artian menuju perubahan yang lebih baik sebagai kelompok penekan), bahkan boleh jadi justru akan memperkuatnya.

Dalam pendekatan "power politics" menilai kepiwaian organisasi, baik ormas maupum orpol, dari efektifitas mobilisasi massa, dari legitimasi actual terhadap opini publik. Power politics menilai orang atau kelompok orang

¹⁰ Keith R. Legg, Tuan hamba dan Politisi, (Jakarta:, 2000), 85

¹¹ Priyatmoko Dirdjosuseno (ed), *Pembaharuan Pemerintahan Lokal*, (Jawa Timur:,), 81

berdasarkan kepentingan, sekaligus kekuatan politiknya. Walaupun organisasi semacam ini dibentuk atas kepentingan bersama dan tidak berdasarkan keisenagn belaka, dalam hal ini hanylah merupakan bentuk dari kekuatan sitem yang ada. Buktinya penguasa lebih diuntungkan dengan membiarkan mereka tumbuh daripada menekannya tanpa alasan yang jelas. 12 Dalam konteks lingkungan eksternal kelompok atau ormas dapat dilihat juga bahwa kecenderungan perubahan budaya masyarakat desa pada tingkat lokal adalah akibat dari modernisasi dan dinamika politik desa. Bagaimana hal ini dapat diartikan sebagai pemberontakan desa yang berusaha menumbangkan struktur lama. 13 Jadi, bisa saja kelompok atau ormas hanyalah bagian dari proses-proses perubahan sosial-budaya masyarakat desa sehingga bisa dimaknai bahwa sesungguhnya organisasi semacam ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian proses modernisasi politik byang sedang berlangsung tanpa bisa dihindari dan mengalir begitu saja. Atau bisa juga dalam pendekatan elit, yang menurut Mocsa bahwa di dalam kelas bawah mau tidak mau terbentuk kelas penguasa lain, atau minoritas yang memimpin dan seringkali kelas baru ini bersifat antagonis terhadap kelas yang memiliki kepemilikan pemerintahan legal. ¹⁴ Kelas bawah, bisa disinggungkan pada fenomena pergulatan elit lokal dalam memanfaatkan kedekatannya dengan mayarakat desa secara langsung untuk membangun sebuah sistem politik yang benr-benar menguntungkan baik bagi dirinya seNdiri yang kemungkinan secara sengaja maupun tidak mencoba meningkatkan scope dan domain of power-nya, maupun kepentingan masyarakat secara umum karena didasarkan pada semangat kebersamaan dan perlawanan.

1

¹³ Samuel P. Huntington, *Tertib I: Di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta:,1983), 64

¹⁴ T.B Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, (Jakarta:, 2006), 34

Ketika masyarakat mulai sadar akan pentingnya menyuarakan aspirasinya, maka perlu dilihat apakah aspirasi itu merupakan sebab atau akibat. Maksudnya, apakah aspirasi yang ada muncul dan berkembang karena adanya pembelajaran politik dan benar-benar merupakan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara ataukah merupakan tindakan reaksioner atas keadaan atau situasi yang ada pada waktu itu saja.

1.3 Konflik Dalam Masyarakat Industri

Masyarakat yang ada di kawasan industri terdiri dari beberapa unsur elemen sosial yang terbentuk karena adanya perkembangan sebuah proses industrialisasi. Permasalahan yang muncul di dalam lingkungan masyarakat industri antara lain :

- a. Hubungan atau interaksi antara atasan-pekerja buruh masyarakat sekitar pabrik.
- b. Adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan kehadiran bangunan-bangunan pabrik yang berada disekitar masyarakat baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi hingga pengaruh perkembangan yang mengarah pada pemahaman atas sifat yang materialistik.

Imbas dari adanya proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang cenderung mengarah pada kecemburuan-kecemburuan sosial, baik yang bersifat materialistik maupun yang diakibatkan dari adanya hubungan atau interaksi yang tidak harmonis dari setiap unsur elemen yang ada di masyarakat industri dalam bentuk social yang mana menurut penulis

hal itu dinamakan sebagai konflik dalam masyarakat industry. Pada hakekatnya semenjak penciptaan hingga perkembangannya manusia cenderung membuat sejarah, tetapi kita tidak pernah bertindak dalam kevakuman, sejarah yang kita buat selalu terjadi dalam suasana interaksi sosial dengan orang lain. Secara hakiki manusia adalah makhuk sosial. Oleh karena itu, mekanisme pergerakan atas perubahan diawali dari kondisi ini. Pencatatan sepanjang sejarah manusia membuat penciptaan terhadap ciri dan sifat manusia yangm selalu menemui konflik. Mitology Yunani misalnya pengenalan akan Ares (Dewa Perang) yang dibenci oleh dewa-dewa lain karena sifatnya yang kejam dan gemar bertengkar dan berperang. Berbeda dengan agama besar lainnya di dunia, berperang menurut ajaran agama Budha adalah berperang di dalam diri individu dan menentang hawa nafsu.

Di kalangan orang Babilonia, konflik adalah abadi dan merupakan perjuangan kosmik. Dewa Marduk setiap tahun berperang menentang kekuasaan, kekacauan yang diwakili oleh Dewi Tiamat yang mana perang ini merupakan perang berkepanjangan yang terjadi sebelum dunia tercipta. Adapun konflik-konflik yang terjadi pada tingkat kekuasaan, struktur birokrasi dan strata sosial di dalam masyarakat merupakan perkembangan manusia dalam pengembangan nilai kreatifitas dan inovasinya,dan hubungan antar dua segmen ini sangat erat. Hal tersebut yang nantinya akan menyebabkan perubahan pada struktur (perubahan pada nilai-nilai atau pranata). Seperti yang dikatakan oleh Dahrendoft seorang sosiolog Amerika, seluruh inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakatnya disebabkan konflik antar kelompok, individu dan

¹⁵ Lauer, 1993: 277- 308

antara emosi dengan emosi dalam diri sendiri. 16 Perkembangan ilmu pengetahuan menurut jamannya sedikit banyak ikut andil dalam perwujudan perkembangan manusia dan dunia secara global. Pengetahuan atas proses perkembangannya yang diawali dengan gesekan-gesekan antar individu ini (konflik) berimplikasi terhadap pembentukkan pola perilaku sosial individu di dalam lingkungan masyarakatnya, dan kompetisi serta persainganlah yang menuntun ke arah perubahan. Adapun bentuk perubahan itu dapat berupa peradaban, kebudayaan, masyarakat, komunitas, institusi, organisasi, interaksi, dan individu. Perubahan-perubahan yang disebabkan adanya kompetisi dan persaingan itu merupakan faktor kreativitas dan inovasi dengan pengertian manusia sebagai individu selalu mengidentifikasi kompetisi sebagai pendorong yang kuat, ganjaran yang dihadapi di dalam hidupnya mengharuskan individu untuk mendasari pelaksanaan pada bentuk pekerjaan. ¹⁷ Perebutan lahan pekerjaan itu dapat dijadikan sebagai contoh bahwasannya manusia ingin berkompetisi untuk saling mengalahkan dan mendapatkan bagian yang maksimal dari ganjaran-ganjaran kebersamaan mereka. Dengan kata lain konflik antar kelompok dapat terlihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada. Jika pendekatan di atas diturunkan pada tingkat kemasyarakatan dalam hal ini lingkungan masyarakat buruh sebagai hasil dari sebuah organisasi industri,dimana perusahaan industri adalah sebuah kelompok kekuatan atau imperatively coordinated group yang mana perusahaan ini memiliki hirarki kekuasaan yang ditandai dengan buruh di bawah (tingkat kekuasaan terendah) dan beberapa tingkat pimpinan (manajemen) di atasnya.

¹⁶ Lauer, 1993: 281-282 ¹⁷ Lauer, 1993: 284

Kekuasaan manajemen adalah sah dan dipertahankan melalui berbagai sanksi (penurunan pangkat, pemecatan dan sebagainya). Oleh karena itu terdapat konflik kepentingan yang melekat antara pengusaha dan masyarakat pekerja. Dengan adanya perbedaan muatan kepentingan antara kedua kelompok tersebut yakni kelompok kepentingan majikan dan kelompok kepentingan buruh mengakibatkan terbentuknya mekanisme konflik yang secara kondusif akan menghasilkan perubahan secara struktural dalam organisasi industri dan dalam posisi relatif di lingkungan masyarakat buruh. Kondisi demikian merupakan perwujudan dari pergesekan yang sifatnya vertical dimana kepentingan kelompok majikan dalam menentukan sistem kebijaksanaan, nilai upah dan pembagian jam itu gesekan-gesekan yang sifatnya vertikal ini kerja. Selain mengesampingkan kekuatan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan di organisasi industri itu. Dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara kekuasaan kepentingan konflik itu sendiri dengan kekuasaan. Dengan kata lain kekuatan kekuasaanyang dimiliki oleh pemegang saham misalnya menentukan di dalam penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan di organisasi industri tersebut atau pabrik. Pengesampingan-pengesampingan yang terjadi pada tingkat pemegang kekuatan kekuasaan itu akhirnya berimbas pada lapisan yang ada di tingkat bawah. Dimana kekuatan buruh pada kondisi ini sama sekali tidak terlihat atau bahkan ditutupi oleh adanya muatan nilai produksi yang cukup tinggi. Kecenderungan akan hasil produksi yang cukup tinggi ini seakan-akan menjadi prioritas pertama di dalam penentuan kelangsungan organisasi industri. Kondisi yang tidak kondusif sekaligus perlakuan yang condong pada pengeksploitasian ini

tanpa disadari akan menciptakan perubahan secara revolusioner di tataran masyarakat buruh. Pembentukan hubungan kolektivitas dan penyeragaman pola perilaku serta penciptaan kompetitif di lingkungan kerja merembes ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya pengolahan yang sifatnya akademik.

Dengan demikian perbedaan-perbedaan yang dimiliki dan terpendam oleh hasil kekuasaan terkadang terlampiaskan untuk memenuhi hasrat yang terkekang. Di dalam pemenuhan hidupnya selalu mengimpikan kelayakkan seperti yang lain dan serasa terlepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Pemenuhan akan tingkat produksi dan jasa-jasa atas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pabrik kerap kali tidak selalu diimbangi oleh pemenuhan akan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan sebagai bentuk lain yang harus dimiliki oleh para pekerja pabrik (buruh) Pemenuhan akan kebutuhan merupakan kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang, pencerminan pemikiran atas hak dan kewajiban seseorang harusnya dapat terlihat ketika tugas yang dilakukan oleh pekerja sudah terpenuhi seharusnya pulalah diimbangi oleh imbalan atas tugas itu yang mana merupakan bentuk atas hak segenap pekerja. Terlepas dari itu semua, pada hakekatnya di dalam setiap menjalankan proses produksi terdapat tiga faktor yang tidak dapat diabaikan, yaitu alam, modal dan tenaga kerja. Ketiga faktor ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi dan jasa-jasa, sekaligus mendapat perhatian atau imbalan yang seimbang yang dengan sumbangan yang diberikannya.Kita berhak mengolah segala bentuk sumber-sumber alam namun kita juga berkewajiban pula untuk memelihara kelestariannya. Janganlah menebang hutan dengan semena-mena karena akan menimbulkan erosi atau

pengotoran udara yang akan menimbulkan krisis ekologi dan mengganggu keseimbangan alam itu sendiri. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja manusia itu sejak lahir berhak menikmati hasil-hasil produksi.Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Setelah ia mencapai usia tertentu manusia itu wajib bekerja. Sesuai dengan martabat kemanusiannya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, "setiap warganegara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak..." Kalau kita mau konsekwen ingin melaksanakan Undang- undang Dasar 1945 itu, maka tenaga kerja dan/atau buruh itu berhak pula menerima imbalan dari sumbangannya dalam proses produksi dalam bentuk upah, jaminan sosial, jaminan hari tua dan perlindungan waktu melaksanakan pekerjaan.

Pengusaha hutan seharusnya menyampaikan keterangan tentang, hilangnya seorang buruh di tengah hutan belantara atau buruh yang mati tertimpa runtuhan waktu pembangunan gedung-gedung. Dalam hal ini pengusaha wajib memberikan uang atau apapun namanya kepada keluarga yang tertimpa musibah itu. Terhadap buruh wanita, penguasa atau majikan wajib menjaganya agar pengusaha atau majikan wajib menjaganya agar dalam bekerja fungsi biologisnya sebagai wanita tidak terganggu. Pemenuhan akan tingkat hidup yang terkadang tidak terpenuhi oleh penghasilannya sebagai buruh pabrik dan adanya perbedaan penghasilan antar sesama pekerja buruh pabrik yang diluar perkiraan dikarenakan adanya perbedaan latar pendidikan dan penguasaan ketrampilan dapat mengakibatkan kondisi kekerasan di lingkungan masyarakat (adanya gesekangesekan yang sifatnya horizontal), seperti pencurian, intrik-intrik sosial yang

kecenderungannya selalu melihat persaingan dalam bentuk material yang akhirnya berkelanjutan menjadi konflik.

